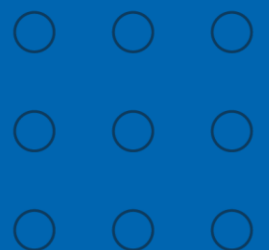


Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Pasuruan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKJIP 2022



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2022 telah disusun sesuai rencana, guna memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2022.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKJIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerjanya.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKJIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan para pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu,

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKJIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah untuk mewujudkan visi – misi Pemerintah Kota Pasuruan.

Demikian semoga dokumen LKJIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022 dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Aamiin .

Pasuruan, 15 Februari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA PASURUAN



IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I

NIP.19730709 199201 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2022. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah yang pada laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan memiliki peran strategis dalam pembangunan TIK, menyediakan infrastruktur TIK, pengelolaan data dan statistik secara sektoral, keamanan informasi dan persandian serta menyebarkan informasi di Kota Pasuruan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam Tahun 2022 dengan alat ukur 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum kinerja dapat berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Sasaran 1** : Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
Indikator : Indeks keterbukaan informasi publik, target Tahun 2022 60 sedangkan realisasi di Tahun 2022 43,87 sehingga capaian di Tahun 2022 73,12%.
- 2. Sasaran 2** : Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Indikator 1 : Indeks tata kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE, target Tahun 2022 2,6 sedangkan realisasi di Tahun 2022 2,00 sehingga capaian di Tahun 2022 76,92%.
Indikator 2 : Indeks layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE, target Tahun 2022 2,6 sedangkan realisasi di Tahun 2022 3,43 sehingga capaian di Tahun 2022 131,92%.
- 3. Sasaran 3** : Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan.
Indikator : Persentase data statistik yang terintegrasi, target Tahun 2022 60 sedangkan realisasi di Tahun 2022 65,09 sehingga capaian di Tahun 2022 108,48%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1
1.2.2 Anggaran	2
1.2.3 Isu Strategis	3
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	7
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja	23
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	23
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	23
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	26
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	27
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	29
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	30

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	32
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	33
3.2 Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP.....	39
LAMPIRAN	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2021) dan Tahun n (2022)	2
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	5
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
Kota Pasuruan	6
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan	7
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2022	8
Tabel 2.5 Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan	9
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2022	14
Tabel 2.7 Perubahan Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan	15
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	22
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022	22
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	25
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	26
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/ Kota	28
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	29
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	31
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	33
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu : Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama tahun 2022 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana pengukuran dan evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan sebagai tolak ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informasi dan bidang statistik. Untuk mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan melalui P-APBD/APBD Tahun 2022.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, serta bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

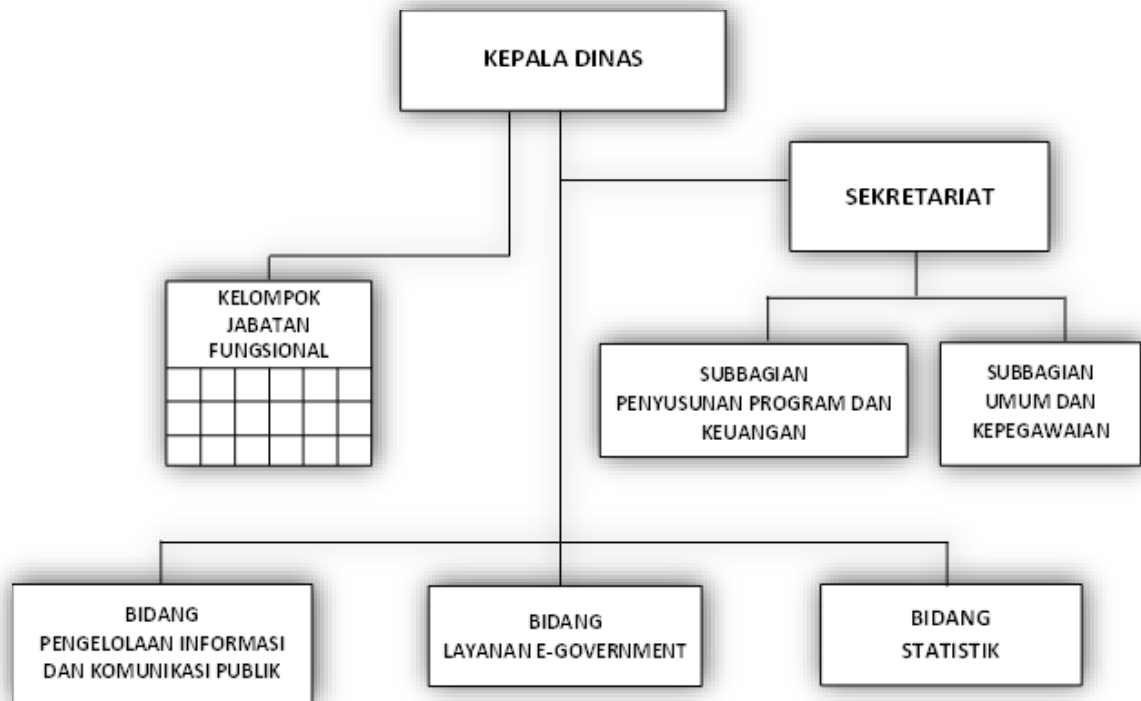
Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan

f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan



Sumber : Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022

1.2.2 Anggaran

Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2022 bersumber dari APBD Kota Pasuruan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp22.601.486.568. Akan tetapi terdapat perubahan anggaran pada bulan Oktober, sehingga jumlah pagu anggaran menjadi Rp18.378.406.185. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun kemarin, terdapat peningkatan anggaran sebesar Rp4.364.724.634 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2021) dan Tahun n (2022)

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2021	Rp14.013.681.551
APBD	2022	Rp18.378.406.185

Sumber : DPPA 2021 dan DPPA 2022

1.2.3 Isu Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan melaksanakan pengelolaan teknologi informasi yang meliputi telekomunikasi, dunia penyiaran (broadcasting) dan internet. Saat ini teknologi informasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga dalam rentang waktu 2021-2026 perlu diprioritaskan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi agar masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam memanfaatkan dunia digital. Permasalahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah :

1. Belum optimalnya layanan informasi publik;
2. Kurangnya ketersediaan data Statistik Sektoral;
3. Belum optimalnya implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan publikasi kegiatan pemerintah daerah pada media cetak, media elektronik dan media sosial;
2. Peningkatan cakupan terintegrasi data sektoral untuk penyusunan statistik pembangunan;
3. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi di seluruh perangkat daerah.

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan disusun dengan landasan hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengalami perubahan dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
11. Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, serta bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

DAFTAR LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Melalui formulasi rumusan tujuan dalam Rencana Strategis, maka Diskominfo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan memiliki keterkaitan erat dengan pertanggungjawaban pencapaiannya. Tujuan yang dirumuskan harus computable agar upaya pertanggungjawabannya dapat tercapai secara obyektif dan terukur.

Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2016 – 2021. Untuk tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tujuan 1 Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik						
	Sasaran 1 Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	60	70	80	80	90
	Sasaran 2 Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
	Sasaran 3 Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,60	2,70	2,80	2,85	2,90
		Indeks layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,60	2,70	2,80	2,85	2,90

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Adapun Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	1.1	Persentase aplikasi yang terintegrasi	%	Merupakan persentase aplikasi yang terintegrasi	= Jumlah aplikasi yang sudah terintegrasi/ jumlah aplikasi yang direncanakan untuk integrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Bidang Layanan e-Government
2.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	2.1	Indeks keterbukaan informasi publik	poin	Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;	nilai indeks keterbukaan informasi publik	Kemendagri
3.	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	3.1	Persentase data statistik yang terintegrasi	%	Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan	= Jumlah data statistik yang terintegrasi/ jumlah data statistik	Perangkat daerah
4.	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4.1	Indeks tata kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	poin	Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu	Nilai Indeks tata kelola SPBE tahun-n	Kemenpan
		4.2	Indeks layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	poin	Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat	Nilai Indeks Layanan SPBE tahun - n	Kemenpan

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2022

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai

dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	poin	60
		Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	%	60
		Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	Poin	2,6
			Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	Poin	2,6

Sumber : Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2022

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Sebagai wujud pernyataan komitmen atau tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, maka rencana kinerja tahunan ditetapkan sebagai penetapan Perangkat Daerah dengan rumusan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan dibuatnya Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2022, secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik.	Indeks keterbukaan informasi publik	60 poin
2.	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,6 poin
		Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,6 poin
3.	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	60%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2022

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.990.614.741
2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 3.765.242.449
3. Program Aplikasi Informatika	Rp 9.112.862.008
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 643.359.730
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 89.407.640

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan yang didukung oleh APBD Pemerintah Kota sebesar Rp22.601.486.568,- yang dituangkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	80	8.990.614.741
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	70	19.664.230
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun	dokumen	2	8.600.120
		jumlah peserta Forum Pemangku Kepentingan	peserta	60	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disusun (dokumen)	dokumen	2	3.999.960
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan monev yang disusun (dokumen)	dokumen	4	3.327.930
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah event pameran pembangunan	kegiatan	1	3.736.220
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	70	3.729.249.946
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN (bulan)	bulan	12	3.623.331.400
		jumlah pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pengelola gaji)	bulan	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yang tersusun (dokumen)	dokumen	1	101.223.606
		Jumlah pembayaran honorarium admin sijaja	bulan	6	
		Jumlah pembayaran honorarium Bendahara Pengeluaran	bulan	12	
		Jumlah pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	bulan	12	
		jumlah pembayaran honorarium Pengguna Anggaran (PA)	bulan	12	
		Jumlah tenaga pengolah data keuangan	orang	2	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (dokumen)	dokumen	2	4.694.940

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	70	61.097.850
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun (dokumen)	dokumen	1	61.097.850
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	70	4.502.145.836
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pelaporan pengelolaan kepegawaian yang disusun	dokumen	1	22.610.610
		Jumlah pembayaran Honorarium Tenaga Pelaksana Lapangan Pengolah Data kepegawaian (Bulan)	bulan	12	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pembinaan rohani yang dilaksanakan	kali	12	4.470.022.226
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (OK)	orang	1	9.513.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	70	121.778.740
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	item	10	7.273.340
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	9	13.350.200
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah penyediaan surat kabar	bulan	12	3.065.400
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah belanja makan dan minum	OK	425	5.060.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	OK	256	93.029.800
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar propinsi	OK	15	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	70	23.200.200
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan kantor	jenis	6	11.988.000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	jenis	15	11.212.200
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	70	341.383.081
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	lembar	194	1.940.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran air, listrik dan telepon	bulan	12	194.295.781
		Jumlah perpanjangan sertifikasi frekuensi	paket	1	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Alat Tulis Kantor	item	30	145.147.300
		Jumlah pembayaran gaji tenaga pendukung (bulan)	bulan	12	
		Jumlah pembayaran honorarium Tenaga Kebersihan Non PNS (Bulan)	bulan	12	
		jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	item	12	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	70	192.094.858
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	unit	12	97.672.721
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	unit	2	35.395.454
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang terpelihara	jenis	5	16.718.168
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemasangan glas box	buah	20	38.308.915
		Pengecatan gedung	m2	200	
		wall paper ruangan	m2	50	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pengecatan dan pemeliharaan tempat parkir	m2	30	3.999.600
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi PD yang di unggah	%	85	3.765.242.449	
	Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media	%	60		
	Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina	%	90		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu	%	70	3.765.242.449	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jasa listrik, telepon dan internet	bulan	12	517.278.605	
	Jumlah Pegawai Non PNS	orang	19		
	Jumlah pemeliharaan alat studio, alat komunikasi dan pemancar	item	2		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		
				K	Rp	
1	2	3	4	5		
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	item	3		
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	OK	20		
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah cetak buku selayang pandang	eks	200	435.390.044	
		Jumlah edisi majalah bangkit	edisi	4		
		Jumlah kegiatan penyusunan IKM	kegiatan	1		
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi PPID	kegiatan	3		
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Ok	180		
		Jumlah petugas jurnalistik	orang	3		
		Jumlah petugas pemasang koran	orang	4		
		Jumlah surat kabar	eks	336		
		Jumlah video selayang pandang	kegiatan	1		
		Layanan Hubungan Media	Jumlah belanja publikasi	item	4	2.690.243.400
			Jumlah informasi masyarakat terkait kegiatan pemerintah kota pasuruan melalui spanduk, baliho insidentil	unit	40	
	Jumlah informasi masyarakat terkait kegiatan pemerintah kota pasuruan melalui spanduk, baliho rutin		unit	100		
	Jumlah kegiatan jumpa pers		kegiatan	48		
	Jumlah kegiatan operasional mobil fox		kali	48		
	Jumlah Poster informasi masyarakat		lembar	208		
	Jumlah pembayaran tenaga pengolah data		bulan	12		
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		persentase blog KIM yang aktif	%	70	59.081.400
		persentase jumlah pengaduan e sambat yang ditindak lanjuti	%	90		
		Persentase jumlah peserta Bakohumas	orang	-		
		Persentase KIM yang aktif	%	70		
		persentase website perangkat daerah yang aktif	%	60		
2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi	%	7	7.964.102.328	
		Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti	%	100		
		Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik	%	85		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan kerusakan jaringan internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai SOP	%	70	7.526.950.928
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Peningkatan Implementasi e-Government	jenis	8	7.526.950.928
		Jumlah Tenaga pendukung IT	orang	8	
		Jumlah tenaga pengolah data bidang e-government	orang	2	
		Jumlah titik Akses Internet dan Jaringan e-Government	titik	113	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	%	70	435.751.400
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah jasa lisensi yang terupdate	item	6	362.042.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Audit Teknologi Informatika	dokumen	1	73.709.400
		Jumlah Pengaduan Masyarakat Online Yang Ditindaklanjuti (SP4N-Lapor)	pengaduan	12	
		Jumlah Peserta Rapat Koordinasi SPBE	orang	55	
		Jumlah Peserta rapat persiapan Kegiatan Bidang Layanan E-Government	orang	120	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan keamanan informasi dan persandian	%	5	89.407.640
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	aplikasi	2	89.407.640
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	aplikasi	2	89.407.640
		Jumlah pengamanan rapat	rapat	-	
		Jumlah peserta Bimtek dan Sosialiasi Keamanan Informasi	orang	55	
		Jumlah Peserta rapat persiapan Kegiatan Bidang Layanan E-Government	orang	45	
		Penyusunan Arsitektur Keamanan Sistem	dokumen	1	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
		Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang di publikasi	%	65	643.359.730
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Data Pokok Pembangunan daerah	OPD	33	643.359.730
		Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Profil Pembangunan daerah	OPD	33	
		Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	%	55	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Data Pokok Pembangunan daerah	OPD	33	595.495.950
		Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Profil Pembangunan daerah	OPD	33	
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	%	55	47.863.780

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2022

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 14 bulan Oktober tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan terjadi pergantian atau mutasi pejabat dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik.	Indeks keterbukaan informasi publik	60 poin

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,6 poin
		Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,6 poin
3.	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	60%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2022

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.908.100.368
2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 3.739.136.639
3. Program Aplikasi Informatika	Rp 9.188.401.808
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 453.359.730
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 89.407.640

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan yang didukung oleh APBD Pemerintah Kota sebesar Rp18.378.406.185,- yang dituangkan pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Perubahan Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	80	4.908.100.368
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	70	29.664.230
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun	dokumen	2	8.600.120

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
		jumlah peserta Forum Pemangku Kepentingan	peserta	60	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disusun (dokumen)	dokumen	2	3.999.960
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan monev yang disusun (dokumen)	dokumen	4	3.327.930
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah event pameran pembangunan	kegiatan	2	13.736.220
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	70	4.059.156.962
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN (bulan)	bulan	12	3.955.479.104
		jumlah pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pengelola gaji)	bulan	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yang tersusun (dokumen)	dokumen	1	98.982.918
		Jumlah pembayaran honorarium admin sijaja	bulan	6	
		Jumlah pembayaran honorarium Bendahara Pengeluaran	bulan	12	
		Jumlah pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	bulan	12	
		jumlah pembayaran honorarium Pengguna Anggaran (PA)	bulan	12	
		Jumlah tenaga pengolah data keuangan	orang	2	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (dokumen)	dokumen	2	4.694.940
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	70	43.541.850
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun (dokumen)	dokumen	1	43.541.850
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	70	62.488.270
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pelaporan pengelolaan kepegawaian yang disusun	dokumen	1	22.610.610
		Jumlah pembayaran Honorarium Tenaga Pelaksana	bulan	12	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
		Lapangan Pengolah Data kepegawaian (Bulan)			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pembinaan rohani yang dilaksanakan	kali	12	30.364.660
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (OK)	orang	1	9.513.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	70	178.478.040
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	item	10	7.273.340
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	9	13.350.200
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah penyediaan surat kabar	bulan	12	3.065.400
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah belanja makan dan minum	OK	425	5.060.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	OK	256	149.729.100
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar propinsi	OK	15	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	70	33.042.200
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan kantor	jenis	6	11.988.000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	jenis	15	21.054.200
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	70	265.915.779
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	lembar	194	1.940.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran air, listrik dan telepon	bulan	12	141.763.479
		Jumlah perpanjangan sertifikasi frekuensi	paket	1	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Alat Tulis Kantor	item	30	122.212.300
		Jumlah pembayaran gaji tenaga pendukung (bulan)	bulan	12	
		Jumlah pembayaran honorarium Tenaga Kebersihan Non PNS (Bulan)	bulan	12	
		jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	item	12	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	70	235.813.037
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	unit	12	134.854.537
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	unit	2	35.395.454
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang terpelihara	jenis	5	23.254.531
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pasangan glas box	buah	20	38.308.915
		Pengecatan gedung	m2	200	
		wall paper ruangan	m2	50	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pengecatan dan pemeliharaan tempat parkir	m2	30	3.999.600
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi PD yang di unggah	%	85	3.739.136.639
		Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media	%	60	
		Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina	%	90	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu	%	70	3.739.136.639
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jasa listrik, telepon dan internet	bulan	12	494.452.795
		Jumlah Pegawai Non PNS	orang	19	
		Jumlah pemeliharaan alat studio, alat komunikasi dan pemancar	item	2	
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	item	3	
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	OK	20	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah cetak buku selayang pandang	eks	200	513.026.044
		Jumlah edisi majalah bangkit	edisi kegiatan	4	
		Jumlah kegiatan penyusunan IKM	kegiatan	1	
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi PPID	kegiatan	3	
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Ok	180	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
		Jumlah petugas jurnalistik	orang	3	
		Jumlah petugas pemasang koran	orang	4	
		Jumlah surat kabar	eks	336	
		Jumlah video selayang pandang	kegiatan	1	
	Layanan Hubungan Media	Jumlah belanja publikasi	item	4	2.660.127.400
		Jumlah informasi masyarakat terkait kegiatan pemerintah kota pasuruan melalui spanduk, baliho insidentil	unit	40	
		Jumlah informasi masyarakat terkait kegiatan pemerintah kota pasuruan melalui spanduk, baliho rutin	unit	100	
		Jumlah kegiatan jumpa pers	kegiatan	48	
		Jumlah kegiatan operasional mobil fox	kali	48	
		Jumlah Poster informasi masyarakat	lembar	208	
		Jumlah pembayaran tenaga pengolah data	bulan	12	
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	persentase blog KIM yang aktif	%	70
	persentase jumlah pengaduan e sambat yang ditindak lanjuti		%	90	
	Persentase jumlah peserta Bakohumas		orang	-	
	Persentase KIM yang aktif		%	70	
	persentase website perangkat daerah yang aktif		%	60	
	2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi	%	7
Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti			%	100	
Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik			%	85	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengaduan kerusakan jaringan internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai SOP	%	70	8.751.250.408
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Peningkatan Implementasi e-Government	jenis	8	8.751.250.408
		Jumlah Tenaga pendukung IT	orang	8	
		Jumlah tenaga pengolah data bidang e-government	orang	2	
	Jumlah titik Akses Internet dan Jaringan e-Government	titik	113		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	%	70	437.151.400
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah jasa lisensi yang terupdate	item	6	362.042.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Audit Teknologi Informatika	dokumen	1	75.109.400
		Jumlah Pengaduan Masyarakat Online Yang Ditindaklanjuti (SP4N-Lapor)	pengaduan	12	
		Jumlah Peserta Rapat Koordinasi SPBE	orang	55	
		Jumlah Peserta rapat persiapan Kegiatan Bidang Layanan E-Government	orang	120	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan keamanan informasi dan persandian	%	5	89.407.640
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	aplikasi	2	89.407.640
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	aplikasi	2	89.407.640
		Jumlah pengamanan rapat	rapat	-	
		Jumlah peserta Bimtek dan Sosialiasi Keamanan Informasi	orang	55	
		Jumlah Peserta rapat persiapan Kegiatan Bidang Layanan E-Government	orang	45	
		Penyusunan Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	dokumen	1	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang di publikasi	%	65	453.359.730
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Data Pokok Pembangunan daerah	OPD	33	453.359.730
		Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Profil Pembangunan daerah	OPD	33	
		Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	%	55	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Data Pokok Pembangunan daerah	OPD	33	405.495.950
		Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Profil Pembangunan daerah	OPD	33	
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	%	55	47.863.780

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	60	43,87	73,12	Sedang	Kemendgari
2	Meningkatnya maturitas	Indeks Tata Kelola SPBE	2,6	2,00	76,92	Tinggi	KemenpanRB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	terhadap Nilai Indeks SPBE					
		Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,6	3,43	131,92	Sangat Tinggi	KemenpanRB
3	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	60	65,09	108,48	Sangat Tinggi	Perangkat Daerah

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Tujuan “Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik”

1. Sasaran “Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik”

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	60	43,87	73,12

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 73,12% (dalam katagori berhasil). Hasil capaian ini didapatkan dari jumlah perangkat daerah yang mengupdate website secara berkala dan konten yang berkualitas sejumlah 22 Perangkat Daerah dari 41 Perangkat Daerah. Seiring berkembangnya waktu, selain website, masyarakat juga mengakses media sosial untuk memperoleh informasi. Pada saat ini selain pengelolaan website, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik melaksanakan pengelolaan media sosial untuk peningkatan layanan informasi. Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan website Perangkat Daerah dan media sosial dilakukan secara berkala oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap konten dalam website maupun media sosial menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tahun berikutnya. Konten dievaluasi berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang mempresentasikan proses pembangunan kota Pasuruan. Ketercapaian ini didukung oleh meningkatnya komitmen Perangkat Daerah untuk mempublish setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi ke dalam website maupun media sosial. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang menangani website dan media sosial telah berkembang baik dari pengolahan website maupun bahasa jurnalistiknya. Ketercapaian target

indikator ini didukung pula oleh konten informasi yang up-to-date serta gaya bahasa yang menarik sehingga masyarakat tertarik untuk mengetahui informasi terbaru dari Pemerintah Kota Pasuruan.

2. Sasaran “Indeks maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,6	2,00	76,92
2	Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,6	3,43	131,92

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 76,92% (dalam kategori berhasil) dan 131,92 (dalam kategori sangat berhasil). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Adapun dasar hukum SPBE adalah Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang evaluasinya mengacu pada Permenpan 5 Tahun 2018.

Pencapaian ini dikarenakan Nilai Indeks SPBE, indeks tersebut menggambarkan tingkat kematangan (Maturity Level) dari pelaksanaan SPBE. Tahun 2022 Pemerintah Kota Pasuruan memiliki target Indeks Tata Kelola SPBE sebesar 2,6 point dan dengan capaian realisasi sebesar 2,00 point. Sedangkan nilai target indikator Indeks Layanan SPBE Tahun 2022 sebesar 2,6 point dan dengan capaian realisasi sebesar 3,43 point. Ketercapaian tersebut dikarenakan adanya kebijakan internal SPBE serta tata Kelola SPBE.

3. Sasaran “Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan”

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Persentase data statistik yang terintegrasi	60%	65,09%	108,48

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar : 108,33% (dalam kategori sangat berhasil). Capaian ini berdasarkan jumlah elemen sebanyak 719 dan telah terpublikasi sebanyak 468 elemen data.

Pencapaian ini dikarenakan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) akan data-data indikator sebagai bahan dalam dalam penyusunan suatu perencanaan atau kebijakan.

3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau Tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	18	16	32,11	60	43,87	73,12
2	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	1,43	1,43	1,4	2,6	2,00	76,92
		Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	3,00	1,88	2,7	2,6	3,43	131,92
3	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	70	70	100	60	65,09	108,48

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Rata-rata pencapaian indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan pada Tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Nilai indeks keterbukaan informasi publik meningkat menjadi 43,87. Hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Sedangkan nilai indeks tata Kelola dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Tahun 2022 juga meningkat menjadi 2,00 dan 3,43 dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai sebesar 1,4 dan 2,7. Hal ini disebabkan oleh pemenuhan indikator indeks SPBE yang sesuai.

Persentase data statistik yang terintegrasi pada tahun ini telah memenuhi target Tahun 2022 dengan nilai capaian sebesar 108,48%. Hal ini disebabkan oleh kesadaran perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan terkait pentingnya data statistik sektoral untuk mewujudkan Satu Data Pembangunan Kota Pasuruan.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	43,87	90	48,74
2	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,00	2,90	68,96
		Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	3,43	2,90	118,28
3	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	65,09	80	81,36

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 ada 3 sasaran utama dengan 4 indikator yaitu :

1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik

Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik merupakan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dengan indikator Indeks keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara. Pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 nilai indeks keterbukaan informasi publik ditargetkan sebesar 90 poin. Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan mendapatkan nilai indeks keterbukaan informasi publik sebesar 43,87 poin. Dengan perolehan nilai tersebut, tingkat kemajuan indikator ini adalah 48,74%. Sehingga kurang 51,26% dalam pemenuhan indikator sampai dengan akhir rencana strategis Tahun 2026.

2. Meningkatnya Maturitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dengan indikator Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE dan Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE. Indeks SPBE merupakan nilai capaian pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 nilai Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE dan Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE ditargetkan sebesar 2,90 poin. Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan mendapatkan nilai Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE sebesar 2,00 dan Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE sebesar 3,43 poin. Dengan perolehan nilai tersebut, tingkat kemajuan indikator ini adalah 68,96% dan 118,28%. Sehingga kurang 51,26% dalam pemenuhan indikator sampai dengan akhir rencana strategis Tahun 2026.

3. Terwujudnya Satu Data Pembangunan Kota Pasuruan

Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan merupakan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dengan indikator Persentase data statistik yang terintegrasi. Pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Persentase data statistik yang terintegrasi ditargetkan sebesar 80%. Pada Tahun 2022 Persentase data statistik yang terintegrasi sebesar 65,09%. Dengan perolehan nilai tersebut, tingkat kemajuan indikator ini adalah 81,36%. Sehingga kurang 18,64% dalam pemenuhan indikator sampai dengan akhir rencana strategis Tahun 2026.

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	43,87	74,43	58,94
2	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,00	-	-
		Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	3,43	-	-
3	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	65,09	-	-

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 merupakan penilaian IKIP secara Nasional untuk pertama kalinya sejak pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang ditandai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nilai IKIP Kota Pasuruan jika dibandingkan dengan nilai IKIP Nasional dan Provinsi Jawa Timur masih sangat kurang. Nilai IKIP Nasional adalah 74,43 dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai 98,09. Sedangkan Pemerintah Kota Pasuruan mendapatkan nilai sebesar 43,87. Terkait hal tersebut, Diskominfo akan melakukan berbagai rencana aksi pada tahun berikutnya demi peningkatan nilai IKIP. Diskominfo akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pengelolaan website dan publikasi informasi pada setiap elemen bidang. Dengan adanya monev tersebut diharapkan Keterbukaan Informasi Publik pada setiap elemen bidang optimal.

Menurut Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati mengatakan bahwa hasil tauval tahun 2022 menghasilkan indeks SPBE 2,34 (menpan.go.id). Berdasarkan pada Keputusan Meteri PanRB Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 3,30. Sedangkan Pemerintah Kota Pasuruan mendapatkan Nilai Indeks SPBE sebesar 2,66 dengan rincian domain indeks tata Kelola SPBE sebesar 2,00 dan indeks layanan SPBE sebesar 3,43. Nilai rincian domain indeks SPBE hanya diketahui oleh masing-masing instansi, sehingga nilai rincian domain indeks SPBE Nasional tidak dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan Nilai Indeks SPBE Nasional, nilai Indeks SPBE Pemerintah Kota Pasuruan di atas ambang batas nilai Nasional. Dalam upaya peningkatan Nilai Indeks SPBE Tahun berikutnya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik akan melakukan evaluasi terkait penerapan arsitektur keamanan SPBE dan masterplan SPBE. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan kualitas penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Pasuruan meningkat.

Sedangkan Data Statistik Nasional dan Provinsi masih dalam tahap Pengembangan dan Sosialisasi. Sehingga capaian indikator tidak dapat dibandingkan.

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	60	43,87	73,12	Hal ini disebabkan karena ada beberapa Perangkat Daerah yang belum menggunakan media sosial untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat, termasuk update informasi pada website
2	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,6	2,00	76,92	Hal ini dikarenakan Kebijakan Proses Bisnis SPBE belum memenuhi standar ketentuan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,6	3,43	131,92	Penyelenggaraan Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Kota Pasuruan diwujudkan dengan adanya portal pusat layanan pengaduan TIK guna untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Portal layanan Pengduan TIK tersebut terdapat pada aplikasi E-Sambat
3	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	60	65,09	108,48	Faktor keberhasilan ketercapaian adalah adanya sinkronisasi data Perjanjian Kinerja dengan Monev di dalam aplikasi kinerja (Sijaja)

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Berdasarkan dokumen Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan memiliki 3 sasaran strategis. Sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Indeks keterbukaan informasi publik. **Hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini adalah** terdapat beberapa Perangkat Daerah yang telah mengaktifkan media sosial untuk penyampaian informasi kepada masyarakat dan ada beberapa Perangkat Daerah yang belum menggunakan media sosial untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat, termasuk update informasi pada website.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik akan melakukan :

- Sosialisasi dan kesepahaman dengan seluruh OPD terkait pentingnya pengarusutamaan informasi publik kepada masyarakat, swasta dan badan publik bekerjasama dengan media massa.
- Memberikan penguatan terhadap peran dan fungsi PPID;
- Kerjasama dengan lembaga-lembaga pengawasan seperti Inspektorat;
- Mendorong percepatan penerapan big data secara terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis digitalisasi.

Sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indikator Indeks Tata Kelola SPBE dan Indeks Layanan SPBE. **Hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini adalah :**

- Tidak tercapainya nilai Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 2,00 disebabkan karena Kebijakan Proses Bisnis SPBE belum memenuhi standar ketentuan.
- Masterplan Arsitektur SPBE belum disahkan melalui SK Walikota.

Sasaran strategis yang ketiga yaitu Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan dengan indikator Persentase data statistik yang terintegrasi. Pada tahun 2022 telah tercapai sebesar 108,48%. **Hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini antara lain :**

- Belum terbentuknya kode klasifikasi data.
- Belum terbentuknya pemetaan sumber data yang berasal dari database aplikasi yang dimiliki Perangkat Daerah.

Diperlukan koordinasi secara intensif untuk pemetaan sumber data agar dapat dikelompokkan sesuai rumpun sehingga memudahkan dalam kode klasifikasi data. Sehingga terwujud keselarasan Data Statistik Sektoral Kota Pasuruan.

3.1.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	60	43,87	73,12	3.739.136.639	3.584.095.713	95,85	Kurang Efisien
2	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	2,00	76,92	9.277.809.448	8.886.707.675	95,78	Efisien
		2,6	3,43	131,92				
3	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	60	65,09	108,48	453.359.730	445.240.920	98,21	Efisien

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari subkomponen-subkomponen yang

menunjang indikator-indikator kinerja yang ada. Pada tahun 2022 realisasi sasaran meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik tidak sesuai target. Capaian indikator kinerja sebesar 73,12% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 95,85%. Artinya tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk dapat mencapai target kinerja adalah 76,29% atau kurang efisien. Berdasarkan data diatas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sudah cukup baik dalam penggunaan dana. Namun, dalam pencapaian target kinerja masih kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya SDM kehumasan pada masing-masing Perangkat Daerah. Sehingga terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum mengelola dan mengupdate website secara berkala untuk peningkatan layanan informasi. Selain itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah melakukan monitoring kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Pada tahun 2022 jumlah KIM yang aktif sebanyak 19 kelompok dari jumlah total 22 kelompok. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang KIM dan seringnya pergantian pengurus dalam KIM.

Realisasi sasaran meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah mencapai target. Capaian indikator kinerja sebesar 104,42% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 95,78%. Artinya tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk dapat mencapai target kinerja adalah 109,02%.

Sedangkan realisasi sasaran Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan juga telah mencapai target. Capaian indikator kinerja sebesar 108,48% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98,21%. Artinya tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk dapat mencapai target kinerja adalah 110,46%.

3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	73,12	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi PD yang di unggah	63,13	Menunjang	Faktor penghambat capaian kinerja adalah karena kurangnya SDM kehumasan pada masing-masing Perangkat Daerah untuk mengelola dan mengupdate website secara berkala
					Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media	156,50	Menunjang	Ketercapaian ini didukung dengan kerjasama yang baik dengan media
					Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina	95,96	Menunjang	Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang KIM dan seringnya pergantian pengurus dalam KIM
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu	133,48	Menunjang	Hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait publikasi
2	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	76,92	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi	542,86	Menunjang	Ketercapaian target indikator ini karena meningkatnya integrasi aplikasi dalam mendukung satu data Kota Pasuruan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Elektronik (SPBE)							
		Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	131,92		Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti	100	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh kapabilitas SDM IT di lapangan, koordinasi yang baik antara operator pengaduan dengan SDM IT di lapangan, dan berfungsinya SOP layanan pengaduan secara optimal
					Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik	117,65	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh adanya 2 usulan yang memenuhi kriteria fitur TTE
				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan kerusakan jaringan internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai SOP	142,86	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh kapabilitas SDM IT di lapangan, koordinasi yang baik antara operator pengaduan dengan SDM IT di lapangan, dan berfungsinya SOP layanan pengaduan secara optimal
				Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pengelolaan e- government di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	142,86	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh kapabilitas SDM Programmer yang memadai
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Persentase layanan keamanan	2000	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh adanya lisensi Firewall sebagai sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				PENGAMANAN INFORMASI	informasi dan persandian			internet. Lisensi SSL untuk melindungi privasi dan integritas data interaksi digital pengguna
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	100	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh adanya komitmen yang kuat untuk menjaga keamanan data dan dokumen
3	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	108,48	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang di publikasi	100,45	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh adanya sinkronisasi data perjanjian kinerja dengan monitoring dan evaluasi capaian kinerja di dalam Aplikasi Pelaporan Jabatan dan Kinerja (Sijaja)
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Data Pokok Pembangunan daerah	100	Menunjang	Hal ini disebabkan karena komitmen yang kuat pada Perangkat Daerah sehingga tingkat keterisian elemen data statistik sektoral semakin meningkat
					Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Profil Pembangunan daerah	100	Menunjang	Hal ini dikarenakan adanya monitoring secara berkala yang dilakukan oleh Bidang Statistik
					Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	118,71	Menunjang	Hal ini dikarenakan adanya monitoring secara berkala yang dilakukan oleh Bidang Statistik

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Untuk mendukung keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan melaksanakan program dan beberapa kegiatan sebagai berikut :

Program : Informasi dan Komunikasi Publik.

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota

Tingkat keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

1. Perangkat Daerah yang mengupdate konten yang berkualitas sejumlah 22 Perangkat Daerah dari 41 Perangkat Daerah berdasarkan laporan tahunan website Perangkat Daerah.
2. Kerjasama yang baik dengan media antara lain media online, media sosial, media elektronik, media cetak (Bhirawa, Radar Bromo, Surabaya Pagi, Harian Bangsa dan Disway), radio (Radio Ramapati), media online (WartaBromo.com, Kabarpas.com, bangsaonline.com, Jatimnow.com, Tribunnews, Liputan Enam dot com, ngopibareng.id, Disway, Akurat.co, detik.com, dan Nusa Daily), dan TV (JTV, Trans7, INews TV, Metro TV, Jawa Pos TV, dan Arek TV).
3. Meningkatnya kemampuan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam mempublikasikan program-program Pemerintah Kota Pasuruan.

Untuk mendukung keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan melaksanakan program dan beberapa kegiatan sebagai berikut :

Program : 1. Aplikasi Informatika

2. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan : - Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

1. 50 Aplikasi yang dikelola oleh Diskominfo Kota Pasuruan
2. 41 website Perangkat Daerah yang dikelola oleh Diskominfo Kota Pasuruan
3. Tersedianya infrastruktur jaringan sebanyak 188 titik akses internet.

Untuk mendukung keberhasilan kinerja sasaran Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan melaksanakan program dan beberapa kegiatan sebagai berikut :

Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat Keberhasilan yang dicapai antara lain adalah ketersediaan dokumen statistik yang memuat :

1. Indikator kinerja pembangunan Kota Pasuruan selama tahun 2022.
2. Dilaksanakannya kegiatan pelatihan petugas pengolah data statistik sehingga SDM Perangkat Daerah dapat memilah serta mengunggah data indikator Perangkat Daerah terkait pada website Satu Data Kota Pasuruan secara berkala.
3. Dilaksanakannya kegiatan monitoring secara berkala yang dilakukan oleh Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik..

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022, pagu dan realisasi anggaran per program dan kegiatan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.908.100.368	4.708.741.560	95,94
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.664.230	18.600.500	62,70
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.059.156.962	3.930.162.402	96,82
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.541.850	41.672.950	95,71
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.488.270	58.281.650	93,27
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.478.040	176.012.612	98,62
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.042.200	25.517.000	77,23
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.915.779	239.384.286	90,02
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.813.037	219.110.160	92,92
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	3.739.136.639	3.584.095.713	95,85
2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.739.136.639	3.584.095.713	95,85

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
3	Program Aplikasi Informatika	9.188.401.808	8.821.029.720	96,00
3.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.751.250.408	8.406.010.645	96,05
3.2	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	437.151.400	415.019.075	94,94
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	453.359.730	445.240.920	98,21
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	453.359.730	445.240.920	98,21
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	89.407.640	65.677.675	73,46
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	89.407.640	65.677.675	73,46
TOTAL		18.378.406.185	17.624.785.588	95,90

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja - Fungsional) Desember 2022

Pengukuran pencapaian kinerja anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada DPPA APBD tahun 2022. APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan tahun 2022 sebesar Rp 18.378.406.185,- dan realisasi tahun 2022 Rp 17.624.785.588,- mencapai 95,90%.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi dan menjadi salah satu bahan evaluasi atas sasaran yang ingin dicapai dalam dokumen perencanaan strategis 2021—2026. Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2022. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi.

Secara umum dalam mendukung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan pada tahun 2022 mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp 18.378.406.185,- yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi tahun 2022 Rp 17.624.785.588,- mencapai 95,90%. Secara keseluruhan dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan pembangunan, dapat dikatakan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan *Berhasil* menyelenggarakan Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan segenap pemangku kepentingan (Kepala Daerah dan unsur pimpinan di daerah, Dinas/Instansi terkait termasuk seluruh komponen internal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, akuntabel dan inovatif sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan pada periode mendatang.

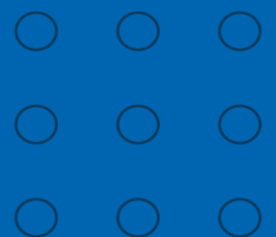
Pasuruan, 15 Februari 2023

Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Pasuruan



IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
NIP. 19730709 199201 1 001

LAMPIRAN



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJATAHUN 2022
TINGKAT ESELON II
PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. SAIFULLAH YUSUF
Jabatan : Walikota Pasuruan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, Januari 2022

Pihak Kedua
Walikota Pasuruan

Drs. H. SAIFULLAH YUSUF

Pihak Pertama
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Kota Pasuruan

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM

Pembina Tk.I
NIP. 19760919 199602 1 003

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA ESELON II

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
TAHUN : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	60
2	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,6
		Indeks layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,6
3	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	60%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.990.614.741	
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 3.765.242.449	
3	Program Aplikasi Informatika	Rp. 9.112.862.008	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 643.359.730	
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 89.407.640	

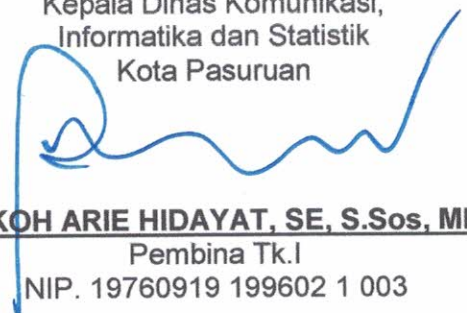
Pasuruan, Januari 2022

Pihak Kedua
Walikota Pasuruan



Drs. H. SAIFULLAH YUSUF

Pihak Pertama
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Kota Pasuruan



KOKOAH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM

Pembina Tk.I
NIP. 19760919 199602 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
TINGKAT ESELON II
PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. SAIFULLAH YUSUF
Jabatan : Wali Kota Pasuruan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, Oktober 2022

Pihak Kedua
Wali Kota Pasuruan

Drs. H. SAIFULLAH YUSUF

Pihak Pertama
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Kota Pasuruan

IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19730709 199201 1 001

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA ESELON II

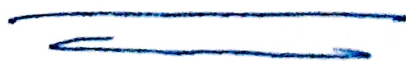
SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
TAHUN : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Indeks keterbukaan Informasi publik	60	60
2	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,6	2,6
		Indeks layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,6	2,6
3	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	60%	60%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN		KET
		SEBELUM	SESUDAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.990.614.741	Rp. 4.908.100.368	
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 3.765.242.449	Rp. 3.739.136.639	
3	Program Aplikasi Informatika	Rp. 9.112.862.008	Rp. 9.188.401.808	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 643.359.730	Rp. 453.359.730	
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 89.407.640	Rp. 89.407.640	

Pasuruan, Oktober 2022

Pihak Kedua
Wali Kota Pasuruan



Drs. H. SAIFULLAH YUSUF

Pihak Pertama
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Kota Pasuruan



IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19730709 199201 1 001

KERTAS KERJA PERHITUNGAN CAPAIAN IKU TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA PASURUAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Metode Formulasi Perhitungan	Data Masukan		Hasil Perhitungan	Sumber Data
				Variabel	Satuan		
1	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	"= nilai indeks keterbukaan informasi publik"	43,87	Indeks	43,87	Kemendagri
2	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	"= (Jumlah data statistik yang terintegrasi/jumlah data statistik) * 100"	468	data	65,09	Perangkat Daerah
				719	data		
3	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem	Indeks tata kelola SPBE terhadap Nilai Indeks layanan SPBE terhadap Nilai Indeks	"= Nilai Indeks tata kelola SPBE tahun - n" "= Nilai Indeks layanan SPBE tahun - n"	2,00	Indeks	2,00	Kemenpan
				3,43	Indeks	3,43	Kemenpan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Pemerintah Kota Pasuruan



**REKAP NILAI SAQ (SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE)
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022**

A. KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
1	Pemkot Batu	100
2	Pemkot Mojokerto	100
3	Pemkot Madiun	100
4	Pemkot Malang	100
5	Pemkab Jember	100
6	Pemkab Lumajang	100
7	Pemkab Situbondo	100
8	Pemkab Pacitan	98,81
9	Pemkab Pamekasan	98,45
10	Pemkot Probolinggo	98,10
11	Pemkab Blitar	97,98
12	Pemkab Bondowoso	91,55
13	Pemkab Banyuwangi	89,64
14	Pemkab Ponorogo	88,04
15	Pemkot Kediri	85,60
16	Pemkab Tulungagung	83,87
17	Pemkab Trenggalek	79,05
18	Pemkab Sampang	76,55
19	Pemkab Ngawi	75,83
20	Pemkab Bojonegoro	66,79
21	Pemkab Malang	65,06
22	Pemkab Lamongan	61,51
23	Pemkab Tuban	54,88
24	Pemkot Surabaya	47,62
25	Pemkot Pasuruan	43,87
26	Pemkab Kediri	40,06
27	Pemkab Sidoarjo	22,20
28	Pemkab Probolinggo	13,21
29	Pemkot Blitar	9,52

B. KATEGORI PEMERINTAH DESA (PEMDES)

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
1	Pemdes Grogol, Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo	94,76
2	Pemdes Ploso, Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar	89,31
3	Pemdes Sumbersari, Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang	84,40
4	Pemdes Paringan, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo	81,07
5	Pemdes Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang	69,64
6	Pemdes Terung, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan	21,59
7	Pemdes Bangunsari, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan	12,02
8	Pemdes Wiyoro, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan	10,36
9	Pemdes Bogoharjo, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan	8,23
10	Pemdes Jetis Lor, Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan	7,86
11	Pemdes Gentengkulon, Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi	4,35
12	Pemdes Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan	2,98
13	Pemdes Pakis Baru, Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan	2,38
14	Pemdes Donorojo, Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan	2,38
15	Pemdes Sumberejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan	1,19
16	Pemdes Bomo, Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan	0
17	Pemdes Sendang. Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan	0
18	Pemdes Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan	0
19	Pemdes Penggung, Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan	0
20	Pemdes Mujing, Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan	0

C. KATEGORI INSTANSI VERTIKAL JAWA TIMUR

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
1	Bawaslu Provinsi Jawa Timur	82,14
2	KPU Provinsi Jawa Timur	80,00
3	Kemenkumham Jawa Timur	75,18
4	PT. SIER Jawa Timur	26,31

D. KATEGORI OPD PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
1	Rumah Sakit Umum Jiwa Menur	100
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	100
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	93,39
4	RSUD dr. Soedono	89,52
5	RSUD Saiful Anwar	86,90
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur	78,75
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur	77,86
8	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	76,96
9	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	76,43
10	Rumah Sakit Umum Haji	58,69
11	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	57,74
12	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Timur	38,55
13	RSUD Dr. Soetomo	20,12
14	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	18,75

E. KATEGORI BAWASLU KABUPATEN/KOTA

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
1	Bawaslu Kabupaten Tuban	98,81
2	Bawaslu Kabupaten Blitar	98,27
3	Bawaslu Kabupaten Malang	98,10
4	Bawaslu Kabupaten Madiun	98,10
5	Bawaslu Kabupaten Mojokerto	97,38
6	Bawaslu Kabupaten Kediri	97,38
7	Bawaslu Kabupaten Ngawi	96,67
8	Bawaslu Kabupaten Bangkalan	94,64
9	Bawaslu Kabupaten Gresik	93,45
10	Bawaslu Kota Madiun	93,15
11	Bawaslu Kabupaten Situbondo	92,44
12	Bawaslu Kota Malang	92,14
13	Bawaslu Kota Blitar	92,14
14	Bawaslu Kabupaten Jombang	91,01
15	Bawaslu Kabupaten Pamekasan	88,69
16	Bawaslu Kota Pasuruan	88,57
17	Bawaslu Bojonegoro	88,10
18	Bawaslu Kabupaten Lamongan	86,90
19	Bawaslu Kabupaten Lumajang	85,60
20	Bawaslu Kabupaten Tulungagung	84,52
21	Bawaslu Kota Mojokerto	83,45
22	Bawaslu Kabupaten Trenggalek	83,21
23	Bawaslu Magetan	83,15
24	Bawaslu Kabupaten Nganjuk	82,68
25	Bawaslu Kabupaten Jember	81,67
26	Bawaslu Kota Surabaya	78,45
27	Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	75,95
28	Bawaslu Kabupaten Ponorogo	73,75
29	Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	69,23
30	Bawaslu Kabupaten Sumenep	68,04
31	Bawaslu Kabupaten Sampang	65,18
32	Bawaslu Kota Batu	61,85
33	Bawaslu Kota Kediri	61,73
34	Bawaslu Kabupaten Pacitan	53,87
35	Bawaslu Kabupaten Pasuruan	45,14
36	Bawaslu Kabupaten Probolinggo	44,40
37	Bawaslu Kota Probolinggo	43,10
38	Bawaslu Kabupaten Bondowoso	26,43

F. KATEGORI KPU KABUPATEN/KOTA

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
1	KPU Kabupaten Sumenep	96,85
2	KPU Kabupaten Magetan	88,10
3	KPU Kabupaten Jember	87,62
4	KPU Kabupaten Jombang	87,50
5	KPU Kota Madiun	86,96
6	KPU Kabupaten Kediri	84,88
7	KPU Kota Probolinggo	83,21
8	KPU Kabupaten Sidoarjo	81,96
9	KPU Kota Blitar	79,40
10	KPU Kab Lamongan	78,45
11	KPU Kabupaten Tuban	78,33
12	KPU Kota Kediri	78,21
13	KPU Kabupaten Trenggalek	77,42
14	KPU Kabupaten Ponorogo	71,55
15	KPU Kab Pacitan	70,42
16	KPU Kab Mojokerto	69,88
17	KPU Kabupaten Bojonegoro	67,62
18	KPU Kabupaten Banyuwangi	67,50
19	KPU Kota Batu	67,56
20	KPU Kab Ngawi	66,37
21	KPU Kabupaten Gresik	65,30
22	KPU Kota Mojokerto	64,58
23	KPU Kabupaten Madiun	63,57
24	KPU Kabupaten Lumajang	61,85
25	KPU Kabupaten Probolinggo	59,70
26	KPU Kab Malang	59,56
27	KPU Kabupaten Tulungagung	56,61
28	KPU Kota Malang	51,51
29	KPU Kabupaten Blitar	47,74
30	KPU Kabupaten Nganjuk	45,69
31	KPU Kabupaten Bondowoso	37,50
32	KPU Kabupaten Situbondo	35
33	KPU Kabupaten Bangkalan	26,67
34	KPU Kab Pamekasan	16,07
35	KPU Kabupaten Sampang	13,51
36	KPU Kota Surabaya	5,06
37	KPU Kabupaten Pasuruan	1,90
38	KPU Kota Pasuruan	0



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Pahlawan No. 28 Pasuruan Telp. (0343) 5616668 Pasuruan Jawa Timur

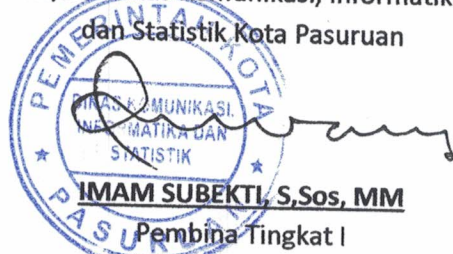
Website : www.pasuruantkota.go.id E-mail : kominfo@pasuruantkota.go.id

DATA STATISTIK SEKTORAL YANG TERINTEGRASI TAHUN 2022

NO	NAMA PD	JUMLAH ELEMEN DATA	JUMLAH DATA YANG TERINTEGRASI
1	Sekretariat Daerah	7	7
2	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu	7	5
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	58	35
4	Dinas Kesehatan	54	38
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	14
6	Dinas Peumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	37	16
7	Dinas Sosial	27	17
8	Dinas Tenaga Kerja	27	15
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	67	35
10	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Petamanan	25	14
11	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil	40	27
12	Dinas Perhubungan	25	17
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	11	8
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	57	38
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	27	17
16	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	37	26
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	7
18	Dinas Perikanan	9	7
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	33	23
20	Satuan Polisi Pamong Praja	9	7
21	Sekretariat DPRD	13	10
22	Inspektorat	19	15
23	RSUD Dr. Soedarsono	12	7
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	4	2
25	Badan Kepegawaian Daerah	38	27
26	Badan Pengelolah Keuangan Dan Aset	5	3
27	Badan Pendapatan Daerah	4	4
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18	17

NO	NAMA PD	JUMLAH ELEMEN DATA	JUMLAH DATA YANG TERINTEGRASI
29	Badan PenanggulanganBencana Daerah	2	2
30	KecamatanBugulkidul	4	2
31	KecamatanPurworejo	4	2
32	KecamatanGadingrejo	4	2
33	KecamatanPanggungrejo	4	2
Total		719	468

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Pasuruan



NIP. 19730709 199201 1 001



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



2022

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2022 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu. Selain itu, pemantauan dan evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2022 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 31 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata

Laksana

NIP. 197208081996032001

PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemantauan ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses	Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis
1. Rintisan Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> .	1. Informasi Layanan SPBE dalam bentuk satu arah
2. Terkelola Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi	2. Interaksi Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah
3. Terstandarisasi Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi	3. Transaksi Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan
4. Terintegrasi dan Terukur Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif	4. Kolaborasi Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan lain
5. Optimum Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas	5. Optimalisasi Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

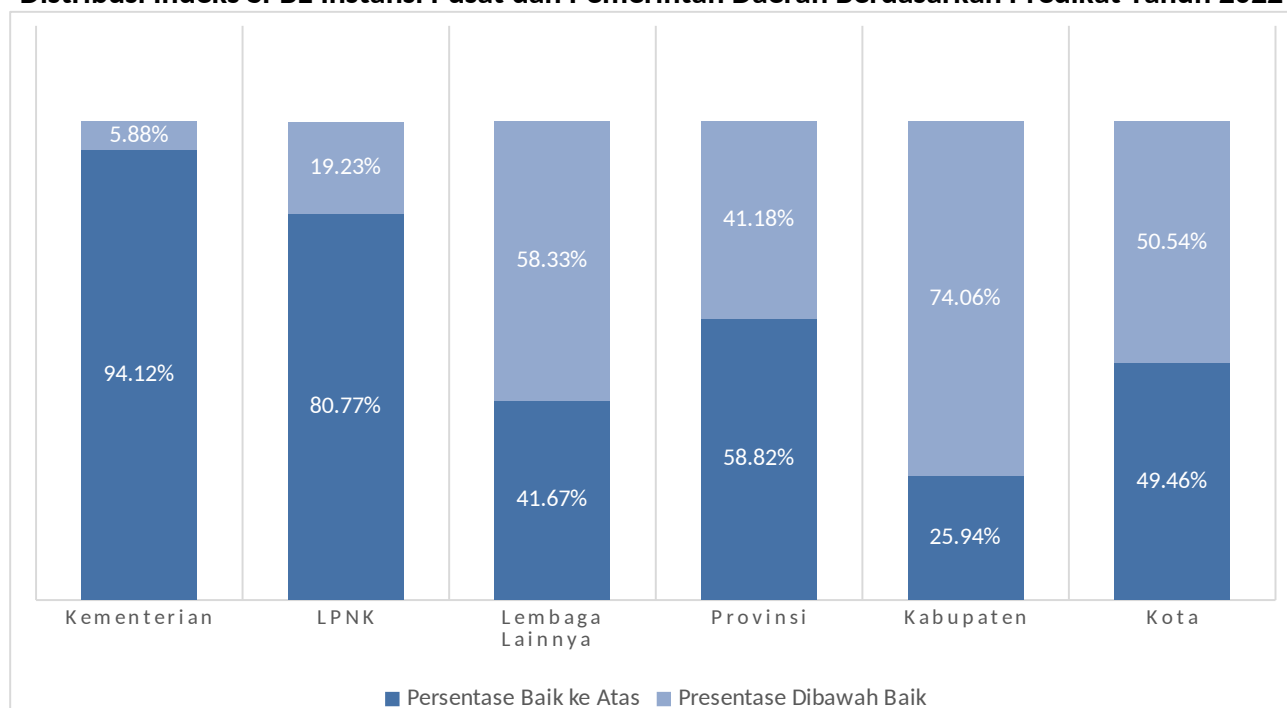
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 - 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 - < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 - < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 - < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 - 5,0	Memuaskan	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 - < 3,5	Baik *)	4	1,8 - < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 - 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 - < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 - < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 - < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

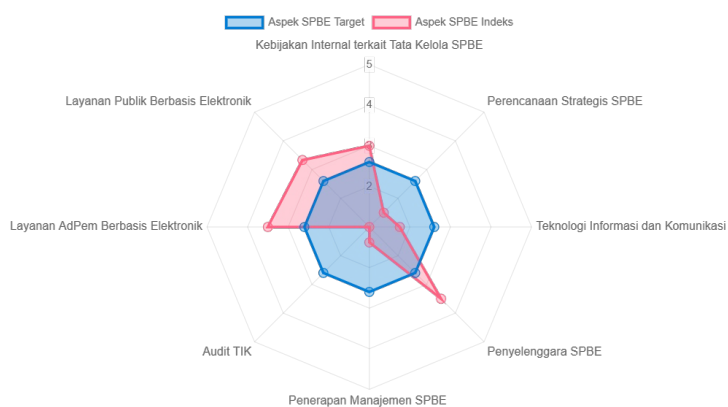
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,35	3,14	2,92	2,33	2,74	2,17	2,50
Domain Kebijakan	2,39	3,08	2,88	2,39	2,69	2,23	2,61
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,39	3,08	2,88	2,39	2,69	2,23	2,61
Domain Tata Kelola	1,85	2,86	2,59	1,94	2,27	1,64	1,98
Perencanaan Strategis	1,70	2,63	2,33	1,90	2,00	1,53	1,70
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,92	2,93	2,77	2,04	2,40	1,68	2,11
Penyelenggaraan SPBE	2,02	3,16	2,75	1,83	2,57	1,78	2,28
Domain Manajemen	1,32	2,01	1,64	1,36	1,51	1,21	1,36
Penerapan Manajemen SPBE	1,35	2,14	1,62	1,37	1,55	1,23	1,41
Audit TIK	1,24	1,66	1,69	1,34	1,38	1,15	1,23
Domain Layanan SPBE	2,97	3,72	3,58	2,86	3,45	2,79	3,18
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,03	3,71	3,58	3,07	3,46	2,85	3,23
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,89	3,74	3,58	2,55	3,44	2,71	3,09

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2022



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2022
SPBE	2,66
Domain Kebijakan SPBE	3,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,00
Domain Tata Kelola SPBE	2,00
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,50
Domain Manajemen SPBE	1,27
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,38
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,43
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,50
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,33

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2021	Nilai Tingkat Kematangan 2022
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	1	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	1	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	1	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	1	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan	3	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	1	2
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	1	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	1	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	2	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	2	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara /	2	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3	1
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	2	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	2	2

45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	2	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	1	4